

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bentuk integrasi dari pembangunan nasional suatu negara yang diarahkan pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi setiap daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah sewajarnya dilaksanakan secara terpadu, selaras, seimbang dan sesuai dengan karakteristik dan prioritas pada daerah tersebut. Undang-Undang mengenai otonomi daerah akan berimplikasi luas dalam sistem perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintahan Daerah akan memiliki kewenangan yang lebih besar dalam merencanakan arah pembangunannya. Di sisi lain, pemerintah daerah akan semakin dituntut untuk lebih mandiri dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan di daerahnya. Otonomi daerah juga mengisyaratkan pentingnya pendekatan pembangunan dengan basis pengembangan wilayah dibanding pendekatan pembangunan dengan pendekatan sektoral (Panuju et., al, 2012).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu langkah konkrit pemerintah untuk mengakomodasikan pembangunan ekonomi dalam bentuk otonomi daerah. Otonomi daerah menciptakan pelimpahan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah dituntut kreatif dalam menciptakan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya, sehingga diharapkan pembangunan yang dilakukan menjadi efektif dan efisien (Masloman, 2020).

Kemiskinan di Indonesia sudah menjadi masalah yang sangat umum dihadapi, hampir di setiap negara berkembang mempunyai masalah yang sama yaitu kemiskinan,

terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat dalam buku yang dikarang oleh Nurkse tahun 1953, yang mengemukakan bahwa kemiskinan yang tinggi terjadi karena jumlah penduduk yang semakin banyak sehingga menyebabkan turunnya investasi masyarakat baik pada pendidikan dan kesehatan yang dapat menghambat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Rendahnya kualitas hidup menyebabkan produktivitas rendah dan kemiskinan tinggi.

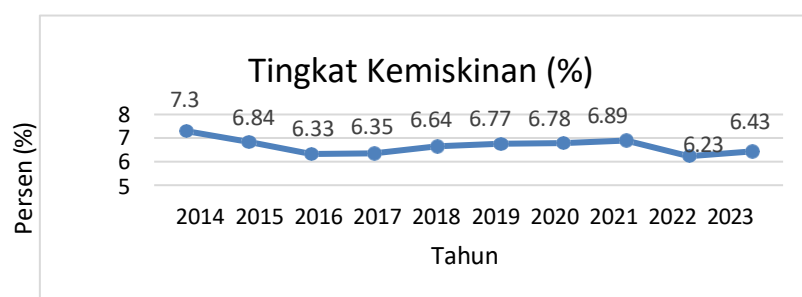
Kemiskinan struktural sering dilihat sebagai suatu gejala yang tetap di tengah-tengah masyarakat. Misalnya melihat kemiskinan struktural sebagai suatu fenomena yang *built-in* di mana ada suatu golongan sosial yang menderita kekurangan-kekurangan fasilitas, modal, sikap mental atau jiwa usaha yang diperlukan untuk melepaskan diri dari ikatan kemiskinan itu. Dengan demikian kemiskinan struktural mencerminkan gejala ketidakmampuan yang melekat di dalam struktur sosial masyarakat (Pinemet., al., 2019).

Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat merupakan salah satu tujuan dari negara Indonesia. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tersebut, pemerintah melakukan pembangunan di berbagai bidang, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Pelaksanaan pembangunan tersebut dikelompokkan dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah, dimana pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan secara lebih luas dapat diartikan sebagai usaha untuk lebih meningkatkan produktivitas sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu negara, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, kapital atau modal maupun sumber daya berupa teknologi, dengan tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Todaro, 2006).

Tingkat kemiskinan menggambarkan persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk total suatu daerah. Tingkat kemiskinan erat hubungannya

dengan disparitas kemiskinan suatu daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2017).

**Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku Utara
Tahun 2014-2023**



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara 2024

Dari tabel diatas menunjukan bahwa tingkat kemiskinan selama 10 tahun terakhir di provinsi maluku utara berfluktuasi naik turun, kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2014 besar 7,30. Tingkat kemiskinan terendah pada tahun 2022 terendah 6,23 penurunan ini mungkin menunjukkan adanya pemulihan ekonomi setelah dampak pandemi.

Sektor pertambangan nikel menjadi salah satu sektor yang mendominasi dalam perekonomian Provinsi Maluku Utara. Nikel merupakan logam yang banyak digunakan dalam industri, terutama untuk pembuatan baja tahan karat, baterai, dan keramik. Kehadiran tambang nikel di Provinsi Maluku Utara memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan royalti tambang. Selain itu, sektor pertambangan juga memberikan dorongan terhadap sektor-sektor terkait, seperti jasa transportasi, perdagangan, dan konstruksi, yang turut merasakan manfaat dari aktivitas pertambangan. Namun, penting untuk diingat bahwa pengembangan sektor pertambangan juga menimbulkan sejumlah tantangan, termasuk dampak lingkungan dan sosial.

Eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, degradasi lahan, dan konflik dengan masyarakat lokal terkait hak tanah dan dampak sosioekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat lokal (Hidayat, 2014).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka penting bagi penulis untuk merumuskan beberapa permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Investasi PMDN, dan sektor pertambangan terhadap serapan Tenaga Kerja?
2. Bagaimana pengaruh Investasi PMDN, sektor pertambangan, tenaga kerja terhadap Kemiskinan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Investasi, dan sektor pertambangan terhadap serapan tenaga kerja.
2. Mendeskripsikan perkembangan investasi PMDN, output yang dihasilkan dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Maluku Utara selama periode tahun 2014-2023.
3. Mendeskripsikan perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku Utara selama periode tahun 2014-2023.
4. Menganalisis pengaruh investasi PMDN, output sektor pertambangan terhadap penyerapan tenaga kerja dan tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku Utara

periode tahun 2021-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang relevan dalam pengelolaan sektor pertambangan di Maluku Utara.
2. Dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien terkait sektor perambangan. Hal ini akan membantu meminimalkan dampak negatif sambil memaksimalkan dampak positifnya terhadap perekonomian dan kesejahteraan.